

**IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI  
KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
(STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**TSABBIT AQYL AL MUNAWWAR**  
**C100130022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI  
KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
(STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**TSABBIT AQYL AL MUNAWWAR**  
**C100130022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muchamad Iksan', is written over a horizontal line.

**(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)

Oleh:

**TSABBIT AQYL AL MUNAWWAR**  
**C100130022**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

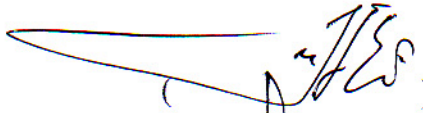
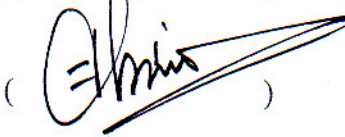

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 5 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

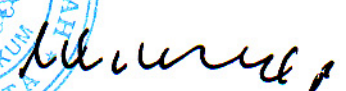
Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()



Dekan,

  
**Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.**  
**NIK. 537**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 April 2018

Penulis



Tsabbit Aqyl Al Munawwar  
C100030022

# **IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)**

## **Abstrak**

Kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu tindak pidana penipuan, namun, dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan ke korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan. Sering kali, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satu hak yang menjadi hak korban ialah sanksi ganti kerugian. Ganti kerugian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan ranah hukum perdata, tetapi demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana. Ganti Rugi untuk korban tindak pidana dijelaskan pada Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yaitu: Dalam pemeriksaan perkara pidana acara biasa dan acara singkat (sumir), penuntut umum hadir dalam persidangan, maka gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya, sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (rekuisitoir), akan tetapi dalam persidangan Penuntut Umum hanya menuntut Pidana saja. Jadi secara praktik penggunaan Pasal 98 tidak berjalan dalam sistem peradilan pidana, namun terdapat kendala dalam hal korban memperoleh ganti kerugian berupa kurangnya pengetahuan korban tentang adanya mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian, prosedur hukum yang rumit, lamanya proses hukum dan masih rancunya aturan hukum tentang pengaturan ganti kerugian oleh karenanya diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat awam khususnya korban kejahatan mengenai mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dan diperlukannya prosedur hukum yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan haknya dan tidak menyita banyak waktu yang panjang supaya korban dapat memperjuangkan haknya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** *tindak pidana, ganti Kerugian, KUHAP*

## **Abstract**

*Crime that often happens and familiar in the community is a criminal act of fraud, however, in practice the handling of a crime occurs a kind of disparity of treatment between the rights given to the victim with a suspect in the legislation. Often, the law puts too much of the rights of suspects or defendants, while the rights of the victims are ignored, one of the rights that the victim is entitled to is a compensation sanction. Indemnification in the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) is the domain of civil law, but for the sake of attainment of simple, speedy, and low cost justice principles this compensation can be combined with a criminal investigation. Compensation for victims of criminal offenses is described in Article 98 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code: In the examination of ordinary criminal proceedings and brief events, the public prosecutor is present at the hearing, the lawsuit can only be filed no later than before the prosecutor filed a criminal lawsuit (rekuisitoir), but in the prosecutor's proceedings only demand Criminal only. So in practice the use of Article 98 does not work in the criminal justice system, but there are obstacles*

*in the case of the victim obtaining compensation in the form of not knowing the victim about the compensation mechanism, the complicated legal procedure, the length of legal process and still the rule of law on the regulation of compensation is therefore expected law enforcement officers in this case the Police, Prosecutors and Courts intensively held socialisasikepad lay people, especially victims of crime compensation mechanisms and the need for easier legal procedures for the victim to get his rights and not seize a lot of long time so that victims can fight for their rights as one form legal protection.*

**Keywords:** *Crime, Indemnification, Criminal Procedure Code.*

## **1. PENDAHULUAN**

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini belum diberikan kedudukan yang adil sehingga keadaan ini menimbulkan 2 (dua) hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog memiliki beberapa istilah diantaranya *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person, invisible* (orang yang dilupakan, tidak kelihatan), *a second class citizen, a second victimization* (sebagai Warga Negara Kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization*.<sup>1</sup>

Putusan perkara tindak pidana dimana korban tidak menggunakan mekanisme gugatan penggabungan ganti kerugian dalam tuntutananya dapat dilihat pada Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN Skt yang menyatakan Terdakwa Sutriyadi Alias Adi Bin Sujiman Sujito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dengan Toko New Surya”. Bahwa terdakwa sebagai sales melakukan penggelapan terhadap Toko New Surya mengenai administrasi berupa tagihan terhadap 9 klien. Bahwa dari 9 klien 6 di antaranya sudah melakukan pembayaran secara lunas, akan tetapi 3 klien sudah membayar akan tetapi barang belum diterima. Barang yang belum diterima oleh 3 toko tersebut, dijual oleh terdakwa ke toko lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, 1985, *Victim In The Criminal Justive System*, Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England, hal. 1 dan 496 .

<sup>2</sup>Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN Skt;

Umumnya pada perkara pidana, setiap korban tindak pidana hanya memiliki tujuan untuk mempenjarakan pelaku tindak pidana, sehingga membuat korban tidak menuntut kerugian lainnya. Akibat dari pandangan demikian ialah tindak pidana hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum. Pasal 14 c KUHP menjelaskan syarat khusus berupa penggabungan ganti rugi bersama-sama dengan hukuman yang dijatuhkan bersama terdakwa, hingga hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pasal ini menguntungkan korban, akan tetapi tidak semua hakim menerapkan Pasal 14 c disebabkan ganti rugi bukan merupakan wewenang hakim pidana. Pada Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.<sup>3</sup>

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.<sup>4</sup>;

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian perkara pidana, se;ring kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak ganti

---

<sup>3</sup> Pasal 99 KUHP

(1) *“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan tersebut”*.

<sup>4</sup>Steen Schafer, 1980, *Compensation and Restitution On Victims of Crime*, New Jersey, Montclair, hal. 8.

kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 98 ayat (1) menjelaskan *“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk; menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”* Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan bahwa *“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis dalam penelitian mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana menurut Pasal 98 KUHAP di Kejaksaan Negeri Surakarta dan untuk mengetahui kendala implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta.

## **2. METODE**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-empiris* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Pasal 98 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pendekatan terhadap realita yang ada yaitu implementasi Pasal 98 KUHAP tentang penggabungan

---

<sup>5</sup>Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta Muhammadiyah University Press, hal. 156



perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana (studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).

Tekhnik pengumpulan data dengan beberapa tahap, yaitu: *pertama*, pengumpulan data primer (*field research*) dengan teknik wawancara dengan Pejabat Kejaksaan Negeri Surakarta dan korban terkait dengan implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta; *kedua*, pengumpulan data sekunder (*library research*) dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait dengan ganti kerugian dalam perkara pidana.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Pasal 98 KUHAP di Kejaksaan Negeri Surakarta**

Korban kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada polisi.

Dahulu ada kasus pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh guru SD. Dia minta dibantu menyelesaikan. Prosedurnya tetap bahwa barang bukti hasil penggelapan disita dahulu, lalu dilakukan proses mediasi antara korban dan tersangka. Tersangka sepakat untuk mengganti rugi kepada korban. Tetapi dicicil, walaupun demikian tersangka tetap di penjara melalui putusan pengadilan. Akan tetapi juga dahulu pernah ada kasus pidana, akan tetapi tersangka secara financial kaya dan karena takut dipenjara maka dia mengganti rugi. Akan tetapi ada juga dia mengganti rugi saat persidangan, jadi itu mengurangi tuntutan pidana tersangka juga.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Hirmawati, Jaks, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Pasal 98 Ayat (1) di KUHP yang menetapkan saat pengajuan gugatan ganti kerugian dalam penggabungan, yaitu “*Dalam pemeriksaan perkara pidana acara biasa dan acara singkat (sumir), penuntut umum hadir dalam persidangan, maka gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya, sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir)*” akan tetapi dalam persidangan Penuntut Umum hanya menuntut Pidana saja. Jadi secara praktik penggunaan Pasal 98 tidak berjalan dalam sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut: (1) Ganti rugi nominal, jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal; (2) Ganti rugi kompensasi, ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain; (3) Ganti rugi penghukuman, ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diberikan kepada kasuskasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.<sup>8</sup>

Menurut Ibu Hirmawati selaku Jaksa yang penulis wawancara, selama menangani perkara pidana, segala tuntutan tentang penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana atau secara terpisah itu merupakan hubungan antara

---

<sup>7</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>8</sup>Fuady Munir, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 2.

pengacara dengan kliennya (korban). Setiap pengacara tidak pernah meminta gugatan ganti rugi kepada pengadilan. Semuanya menunggu putusan dari PN terlebih dahulu, baru melanjutkan gugatan ganti rugi secara perdata. Hal ini dilakukan secara terpisah.<sup>9</sup>

Asas ini menghendaki adanya suatu peradilan yang efisien dan efektif, sehingga tidak memberi penderitaan yang berkepanjangan kepada tersangka atau terdakwa agar kepastian hukum lebih terjamin.<sup>10</sup> Sekalipun melalui proses yang berbeda, kedua cara tersebut didasarkan pada satu dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 1365 KUHPperdata yang isinya: “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.<sup>11</sup>

Padahal menurut saksi Dewi Ratnawati telah terjadi kerugian perdata di tempat dia bekerja. Bahwa, yang menjadi korban tersebut adalah Toko New Surya Jl. Veteran No. 205, Kec. Serengan, Kota Surakarta dan pelakunya adalah terdakwa Sutriyadi Alias Adi Bin Sujiman Sujito (Alm) selaku karyawan yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan April 2017.<sup>12</sup>

Penggabungan perkara gugatan ganti rugi harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya. Adapun isi dari Gugatan Ganti Rugi tersebut adalah: (1) Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga *persona standi in judicio*, yang menerangkan nama, alamat, umur, pekerjaan para pihak; (2) Posita yang merupakan duduk perkara atau alasan-alasan mengajukan gugatan, menerangkan fakta hukum yang dijadikan dasar gugatan atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi*.

Tuntutan (*petitum*), yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim (Pasal 178 ayat 3 HIR).

---

<sup>9</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta..

<sup>10</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>11</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>12</sup>Dewi Ratnawati, Saksi di Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 21 Januari 2018 jam 14.00 WIB.

Implementasi penggabungan perkara menurut pasal 98 KUHAP belum pernah terjadi pada Pengadilan Negeri Surakarta, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- 1) Tidak pernah ada permintaan dari korban untuk mengajukan penggabungan perkara karena selama ini sebagian besar korban penipuan awam terhadap hukum sehingga tidak mengetahui mengenai keberadaan pasal 98 KUHAP, walaupun tahu itupun dari penasehat hukum sehingga korban tidak ada yang memanfaatkan pasal tersebut, dan korban biasanya merasa puas dengan penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku.
- 2) Pengadilan harus melihat mengenai perkara tersebut merupakan kewenangannya untuk mengadili atau bukan karena perkara tersebut berkaitan dengan pasal 98 KUHAP, yang menyangkut perkara pidana dan perdata sehingga harus memperhatikan kedudukan para pihak secara yuridis. Apabila perkara pidana dan perdata dalam satu wilayah hukum itu tidak ada masalah.
- 3) Yang menjadi masalah kalau kedua pihak antara korban dengan yang digugat adalah bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda. Karena Penggabungan perkara ini yang oleh Undang-undang disebut pembuktian yang nyata, maksudnya adalah bahwa Pasal tersebut merupakan dasar penuntutan secara riil dan immateriil, secara riil berarti bahwa kerugian itu didasarkan pada nilai yang nyata. Secara immateriil berarti, bahwa seorang korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang sifatnya tidak bisa dinilai dengan nominal, misalnya : masa depan, harga diri dan lain-lain, dimana dari kerugian immateriil ini keputusannya diserahkan kepada kebijakan Hakim dalam melihat kemampuan si pelaku untuk melakukan prestasinya.
- 4) Kurangnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pasal 98 KUHAP berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana, dan kurang jelasnya pengaturan Hukum mengenai kepentingan Hukum korban tindak pidana.

Kerugian perdata sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kerugian Rp. 31.767.643,- (tiga puluh

satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) karena di luar konteks perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa sekarang ini, karena uang tersebut untuk membayar nota pembayaran lain yang dipakai oleh terdakwa.<sup>13</sup> Kuasa hukum dari korban menyatakan bahwa dengan tidak digabungkan gugatan ganti rugi pada perkara pidana agar menghindari putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama.<sup>14</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas adalah perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian. Jadi antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karenanya antara kejadian dan orang yang membuat kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Apabila ada suatu perkara penggabungan gugatan ganti rugi terhadap putusan perkara perdatanya terdakwa menerima, tetapi tidak untuk pidananya, maka putusan perdatanya tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu menunggu sampai putusan pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya apabila terdapat putusan perkara pidananya terdakwa menerima, tetapi tidak untuk putusan ganti ruginya, terdakwa tidak berhak mengajukan banding. Demikian pula halnya penggugat. Penggugat kehilangan haknya untuk naik banding mengenai putusan ganti rugi apabila terdakwa menerima putusan perkara pidananya. Hal ini sesuai sifat tuntutan ganti rugi itu sendiri yang mengikuti perkara pidananya.<sup>15</sup>

### **3.2 Kendala Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta**

Setiap upaya tentunya memiliki hambatan atau kendala masing-masing termasuk dalam hal ini bagi korban penganiayaan untuk meminta ganti kerugian atas penderitaan yang dialami walaupun mekanisme untuk mengupayakan ganti

---

<sup>13</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>14</sup>Hino, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, tanggal 21 Januari 2018 jam 16.00 WIB.

<sup>15</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

kerugian sudah jelas diterangkan dalam beberapa ketentuan hukum misalnya saja dengan penggabungan perkara, kebanyakan dari korban tindak pidana justru tidak mengetahui tentang adanya proses penggabungan perkara sehingga terkadang dalam praktek korban Penganiayaan hanya sebatas dijadikan saksi korban dalam proses persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana, hal ini jelas secara tidak langsung merugikan hak-hak korban mengingat korban sudah mengalami kerugian baik fisik, psikis maupun ekonomi atas terjadinya tindak pidana yang dialaminya.<sup>16</sup>

Problematika korban untuk menuntut haknya juga dapat dilakukan melalui proses gugatan perbuatan melawan hukum, dalam praktek di lapangan terkadang hakim justru meminta korban untuk meminta ganti rugi melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu mengugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang mengingat mekanisme persidangannya dilakukan dengan menggunakan metode acara perdata biasa. Hal ini justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban karena dapat memakan waktu berbulan-bulan, ditambah ganti kerugian kepada korban barulah dapat diberikan jika terdakwa dijatuhi pidana atau tindakan tata tertib. Jadi, kalau terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum maka tuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada terdakwa tidak dapat dikabulkan.<sup>17</sup>

Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan: gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum, Karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assessor.

---

<sup>16</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>17</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Kurangnya komunikasi antara pengacara dengan korban (klien) mengenai kasus yang hendak disidangkan. sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum tersebut tentunya tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya pada diri seseorang, tetapi perlu adanya suatu proses yang tidak pendek untuk menumbuhkannya. Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara seperti pengkhabaran, pemberitahuan, pendidikan, maupun pengajaran.<sup>18</sup>

Advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu atau korban ketidakadilan. Adakalanya, mereka yang tidak tahu dan mengerti, seringkali tunduk dan patuh atas kemauan advokat, serta banyaknya advokat yang nakal, baik terhadap klien maupun terhadap aparat penegak hukum lainnya. Paling tidak sebagai upaya memberikan kesatuan atau tafsiran atas adanya pandangan hukum yang selama ini disalah mengerti.<sup>19</sup>

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum harus mandiri atau otonom tidak tergantung kepada yang lain dalam persidangan, advokat harus menjaga diri dan menahan nafsu agar tidak jatuh atau terpelesek, maka itu preseden buruk bagi penegakkan hukum kedepan, maka jadilah advokat sebagai pilar atau benteng terakhir penjaga dan pengawal keadilan, apa jadinya indonesia sebagai Negara, bila advokat menjadikan hukum dan keadilan sesuatu yang bisa ditawar-tawar atau warna bisa dirubah-rubah, advokat memberikan jasa hukum untuk keadilan dan tegaknya hukum di Indonesia sebagai Negara hukum.<sup>20</sup>

Kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana juga mempunyai aspek negatif. Dikatakan demikian karena melalui optik

---

<sup>18</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>19</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>20</sup>Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

KUHAP perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Aspek ini implisit melalui ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 100 ayat (2) KUHAP “Apabila dalam suatu perkara pidana yang tidak diajukan permintaan banding, maka ganti rugi tidak diperkenankan.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>21</sup>

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dari hal-hal tersebut di atas, yaitu bahwa perlindungan terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun mulai tingkat pemeriksaan di kepolisian proses pemidanaan tersebut telah dimulai dan dalam hal ini korban terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perwujudan perlindungan korban perlu ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian. Apakah bekerjanya aparat penegak hukum tersebut justru menimbulkan “*second victimization*” terhadap korban. Korban tindak pidana khususnya perkosaan perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana perkosaan. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberianganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.<sup>22</sup>

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada

---

<sup>21</sup> Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>22</sup> Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.



apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.<sup>23</sup>

Problematika yang melanda penegakan hukum terdapat pada faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Pada perspektif penegakan hukum, faktor tersebut menjadikan agar suatu kaidah hukum dapat berjalan secara efisien maupun efektif. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:<sup>24</sup>

*Pertama*, faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Berdasarkan perspektif peraturan undang-undang yang merupakan produk pemerintah mengharapkan dampak positif dari penegakan hukum. Hukum dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang yang ada, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Pada undang-undang yang ada terdapat permasalahan yang menghambat penegakan hukum, yakni: (1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang; (2) Belum ada peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (3) Ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang mengakibatkan multitafsir pada penerapannya.

*Kedua*, faktor penegak hukum. Penegakan hukum mencakup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan masyarakat. Dalam mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat merupakan hal yang utama dalam profesi hukum. Penegak hukum harus peka terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

---

<sup>23</sup> Hirmawati, Jaksa, *Wawancara Pribadi*, pada 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB di Kejaksaan Negeri Surakarta.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 102-104.

*Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Penanganan suatu perkara tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut: (1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru; (2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan; (3) Yang kurang, harus ditambah; (4) Yang macet harus dilancarkan; dan (5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

*Keempat*, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Terdapat golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

## **PERSANTUNAN**

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga. Saudara-saudaraku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University of Surakarta.

Munir, Fuady. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Rena, Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Schafer, Steen. 1980. *Compensation and Restitution On Victims of Crime*, New Jersey: Montclair.

Shapland, Anna., Willmore Jon., Duff, Peter, 1985, *Victim In The Criminal Justive System*, Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

### **Peraturan Perundang-undangan**

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

*Press Release Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor: 26/Pr/Lpsk/Iv/2012.*